

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan kerangka teoritik yang telah peneliti buat, maka secara rinci tujuan utama penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
2. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
3. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
4. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh Jumlah Anggota Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
5. Memberikan fakta dan bukti empiris mengenai pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, objek yang menjadi sasaran penelitian adalah laporan keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2010-2012. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada karakteristik daerah yang dilihat dari variabel tingkat ketergantungan dan rasio kemandirian keuangan daerah, kompleksitas daerah yang dilihat dari variabel jumlah

SKPD dan ukuran legislatif, dan hasil audit BPK yang dilihat dari variabel jumlah temuan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan 5 (lima) variabel independen yaitu tingkat ketergantungan, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif, dan temuan audit.

D. Jenis dan Sumber Data

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan, orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel, adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Suharyadi, 2009). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2010-2012 yang telah diaudit oleh BPK. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu (Suharyadi, 2009). Kriteria-kriteria atas sampel adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang tersedia dan telah di audit oleh BPK periode tahun 2010-2012

- 2) Laporan keuangan Pemerintah Provinsi yang menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual atau sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 Lampiran II.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini akan diuji variabel independen yaitu tingkat ketergantungan, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif, jumlah temuan, dan tingkat penyimpangan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Variabel Dependen

1.1. Tingkat Pengungkapan LKPD

1) Definisi Konseptual

Tingkat pengungkapan LKPD yang dimaksud adalah perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II. Tingkat pengungkapan LKPD ini menggambarkan seberapa besar pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibandingkan dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan.

2) Definisi Operasional

Pengukuran tingkat pengungkapan LKPD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DISC} = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam PSAP}}$$

Data pengungkapan dalam LKPD dilihat dari laporan keuangan pemerintah masing-masing Provinsi yang didapat langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan data pengungkapan dalam PSAP dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012), dimana tingkat pengungkapan LKPD yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *scoring*. Sistem *scoring* yang dimaksud adalah dengan membuat daftar *checklist* pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. *Checklist* pengungkapan yang diwajibkan terdapat sebanyak 264 butir item pengungkapan.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan, rasio kemandirian keuangan daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif, dan jumlah temuan.

2.1. Tingkat Ketergantungan (DEPEND)

1) Definisi Konseptual

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana yang bersifat *block grant* (umum) sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah (Halim, 2014). Besar DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah

fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan demikian, adanya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan konsekuensi berupa monitoring dari pusat ke daerah terkait keleluasaan pemerintah daerah dalam menggunakan dana tersebut, apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya.

2) Definisi Operasional

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Hilmi (2011) dengan menggunakan proksi Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Dengan demikian, proksi untuk mengukur tingkat ketergantungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (MANDIRI)

1) Definisi Konseptual

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Definisi Operasional

Setyaningrum dan Syafitri (2012) menggunakan proksi dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dan kewajiban. Sejalan dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012), penelitian ini juga menggunakan proksi membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dan total pinjaman. Data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Total Kewajiban dilihat dari laporan keuangan pemerintah masing-masing provinsi yang didapat langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian, proksi untuk mengukur rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

$$\text{MANDIRI} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}}$$

2.3. Jumlah SKPD (SKPD)

1) Definisi Konseptual

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

2) Definisi Operasional

Jumlah SKPD merupakan salah satu proksi untuk mengukur kompleksitas pemerintah. Penelitian ini menggunakan proksi yang dipakai penelitian Hilmi (2011), yaitu dengan melihat jumlah SKPD yang ada di setiap Provinsi. Data jumlah SKPD dilihat dari website masing-masing pemerintah Provinsi.

Dengan demikian, proksi untuk mengukur jumlah SKPD sebagai berikut :

SKPD = Jumlah SKPD

2.4. Ukuran Legislatif (LEG)

1) Definisi Konseptual

DPRD sebagai badan legislatif mempunyai fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah agar Pemerintah dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan proksi anggota DPRD sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012). Maka proksi yang digunakan untuk

mengukur ukuran legislatif adalah jumlah anggota DPRD. Data anggota DPRD diperoleh dari website Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu www.kemendagri.go.id.

Dengan demikian, proksi untuk mengukur ukuran legislatif sebagai berikut :

LEG = Jumlah anggota DPRD

2.5. Jumlah Temuan (FIND)

1) Definisi Konseptual

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Definisi Operasional

Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Hilmi (2011) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan BPK atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal yang berlaku sebagai proksi dalam mengukur temuan audit. Data jumlah temuan audit dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (LHPS) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui website www.bpk.go.id.

Dengan demikian, proksi untuk mengukur jumlah temuan audit sebagai berikut :

FIND = Jumlah Temuan Audit

F. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel. Data panel digunakan karena merupakan gabungan antara data *time series* tahunan selama 3 tahun (2010-2012) dan data *cross section* berupa Pemerintah Provinsi di Indonesia sebanyak 33 Provinsi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk membantu menggambarkan keadaan (fakta) yang sebenarnya dari suatu penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2003). Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum.

Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama sekali tidak menarik kesimpulan apapun. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas, rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada/tidaknyapenyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yangdigunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, multikolonieritas,heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini hanya diperuntukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Multikolonearitas dapat dilihat dengan menganalisis nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolonearitas jika:

1. Tingkat korelasi $> 95\%$,
2. Nilai *Tolerance* $< 0,10$, atau
3. Nilai VIF > 10 .
4. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali, 2011).

2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian

yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat masalah autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terdapat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini tidak hanya mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, melainkan juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Untuk melihat bagaimana

pengaruh dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah Model Regresi linier berganda yang dirumuskan dengan model :

$$DISC = \alpha + \beta_1 DEPEND + \beta_2 MANDIRI + \beta_3 SKPD + \beta_4 LEG + \beta_5 FIND + \varepsilon$$

Keterangan :

DISC = Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

DEPEND = Tingkat Ketergantungan Daerah

MANDIRI = Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

SKPD = Jumlah SKPD

LEG = Ukuran Legislatif

FIND = Jumlah Temuan

ε = Error

6. Uji Hipotesis

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien dan signifikansi dari tiap-tiap variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji hipotesis inilah yang nantinya dijadikan dasar dalam menyatakan apakah hasil penelitian mendukung hipotesis penelitian atau tidak.

6.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu berarti model semakin baik (Ghozali, 2011).

6.2. Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji Statistik t, yaitu pengujian koefisien regresi secara parsial dengan menentukan formula statistik yang akan diuji. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan dalam pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau dengan melihat nilai probabilitas dari t-hitung. Jika nilai t-hitung $>$ t-tabel atau jika nilai probabilitas $t < \alpha = 0,05$ maka tolak H_0 , sehingga kesimpulannya adalah variabel independen secara parsial signifikan mempengaruhi variabel dependen.

6.3. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F merupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih

lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$).

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $f > 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedelapan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $f \leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.